

Nama : Tria Meilisma

NPM: 2313031029

1. Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum bisa dikatakan efisien. Hal ini karena sebagian besar anggaran, yaitu 68%, masih habis untuk gaji dan tunjangan guru, sedangkan porsi untuk meningkatkan mutu pembelajaran masih kecil. Padahal, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi dan numerasi, ketimpangan mutu sekolah kota dan desa, serta kurangnya guru di daerah terpencil.

Bagian yang perlu direalokasi adalah:

- **Belanja gaji dan tunjangan guru**, terutama untuk mengurangi penumpukan guru di kota dan mengalihkan dukungan ke daerah yang kekurangan guru.
- **Belanja administrasi dan lainnya**, karena porsinya perlu ditekan agar dana lebih banyak digunakan untuk kebutuhan yang langsung berdampak pada siswa.
- **Belanja infrastruktur dan bantuan siswa**, karena kedua pos ini harus diperbesar untuk mendukung sekolah desa, memperkuat fasilitas digital, dan membantu siswa yang membutuhkan.

Anggaran pendidikan sebaiknya lebih banyak diarahkan pada hal-hal yang langsung meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

2. Ya, pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah, terutama jika hampir seluruh beban utama pendidikan ditopang APBD. Ketergantungan seperti ini rawan tidak stabil ketika kapasitas fiskal daerah terbatas atau prioritas politik berubah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memang memegang peran penting, tetapi pembiayaan pendidikan yang sehat biasanya membutuhkan kombinasi sumber pusat, daerah, dan dukungan nonpemerintah. Sektor swasta dan skema alternatif sebaiknya dilibatkan, tetapi bukan untuk menggantikan tanggung jawab negara. Model yang paling tepat adalah public-private partnership untuk infrastruktur digital, penyediaan perangkat TIK, internet sekolah, dan pelatihan digital guru; serta pendanaan berbasis kinerja untuk program inovasi sekolah. Untuk bantuan siswa, skema matching fund dari CSR atau filantropi dapat dipakai, tetapi harus tetap dikoordinasikan pemerintah agar tepat sasaran dan tidak menambah ketimpangan. Skema pembiayaan alternatif yang juga cocok adalah matching fund, yaitu dana dari swasta atau filantropi dipadukan dengan dana pemerintah untuk program tertentu. Model ini efektif untuk program inovasi sekolah, digitalisasi, dan bantuan siswa miskin. Dengan kombinasi ini, pembiayaan pendidikan menjadi lebih kuat, lebih fleksibel, dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber saja.
3. a. Elemen OECD yang realistis untuk diadopsi adalah performance-based budgeting, alokasi dana berbasis kebutuhan siswa, evaluasi berbasis data, dan

prioritas pada kualitas guru. Prinsip-prinsip ini cocok karena masalah Nusantara Raya bukan hanya kekurangan anggaran, melainkan alokasi yang belum berbasis hasil dan belum sensitif terhadap kebutuhan wilayah. OECD juga menekankan bahwa pembiayaan pendidikan harus diarahkan pada outcome, bukan sekadar input

b. Tantangan implementasinya di Indonesia adalah kapasitas data yang belum merata, kualitas manajemen daerah yang berbeda-beda, serta resistensi birokrasi dan distribusi guru yang sudah terlanjur mapan. Selain itu, sistem data sekolah, guru, dan hasil belajar sering belum terintegrasi sehingga evaluasi berbasis data sulit dijalankan konsisten. Tanpa perbaikan tata kelola, model berbasis kinerja justru berisiko menjadi formalitas administratif.

4. **Tahun 1–2**, Pemerintah perlu melakukan penataan ulang struktur belanja pendidikan dengan mengurangi ketergantungan pada belanja gaji dan memperbesar alokasi untuk bantuan siswa, perbaikan sarana, serta pemenuhan kebutuhan sekolah di daerah terpencil. Pada tahap ini, perlu dilakukan audit anggaran dan pemetaan kebutuhan guru, sekolah, serta wilayah agar kebijakan pembiayaan lebih tepat sasaran dan tidak lagi berfokus pada pengeluaran rutin semata. Selain itu, pada dua tahun pertama ini perlu dibangun dasar reformasi melalui identifikasi sekolah yang paling membutuhkan intervensi. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan sekolah prioritas, terutama yang memiliki kekurangan guru, infrastruktur terbatas, dan hasil belajar rendah. Dengan demikian, perubahan struktur belanja dapat diarahkan pada pemerataan layanan pendidikan.

Tahun 2–3, fokus reformasi diarahkan pada peningkatan kualitas guru melalui redistribusi guru dari wilayah yang kelebihan tenaga ke daerah yang kekurangan guru. Kebijakan ini perlu disertai dengan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil agar pemerataan tenaga pendidik dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi perlu diperkuat agar guru tidak hanya merata secara jumlah, tetapi juga meningkat secara kualitas. Pada periode ini, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengembangan profesional guru terhubung dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Program pelatihan sebaiknya disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga peningkatan kapasitas guru benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran siswa. Dengan cara ini, reformasi guru menjadi bagian penting dari reformasi pembiayaan.

Tahun 3–4, reformasi perlu diarahkan pada digitalisasi sekolah, terutama melalui penyediaan jaringan internet, perangkat pembelajaran digital, dan pelatihan literasi digital bagi guru maupun siswa. Prioritas utama harus diberikan kepada sekolah di daerah tertinggal agar kesenjangan digital antara sekolah kota dan desa dapat dikurangi secara bertahap. Digitalisasi bukan hanya

soal penyediaan perangkat, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan operasional. Pada tahap ini, digitalisasi juga harus dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Platform digital dapat digunakan untuk administrasi, pembelajaran jarak jauh, dan pemantauan perkembangan siswa. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu, bukan sekadar modernisasi fasilitas.

Tahun 4–5, pemerintah perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data. Indikator utama yang dipantau meliputi serapan anggaran, distribusi guru, akses digital, kehadiran guru, serta perkembangan literasi dan numerasi siswa. Evaluasi dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Selain itu, hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar pemberian insentif dan penentuan alokasi anggaran tahun berikutnya. Sekolah yang menunjukkan perbaikan kinerja dapat memperoleh dukungan tambahan, sedangkan sekolah yang belum berkembang perlu mendapat pendampingan lebih intensif. Dengan mekanisme ini, reformasi pembiayaan pendidikan menjadi lebih akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil.